



Wagub Harap Kabupaten Raih WTP

■ Ida Sundari Jabat Kepala BPK Kalbar

PONTIANAK, TRIBUN - Ida Sundari secara resmi menjabat sebagai Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalbar menggantikan Didi Budi Satrio yang akan bertugas sebagai Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalsel, Selasa (13/12)

Pada Serah Terima Jabatan Kepala Perwakilan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Perwakilan Kalbar, Wakil Gubernur Kalbar Christiadi Sanjaya mengatakan BPK RI di Kalbar selama kepemimpinan Didi Budi Satrio telah banyak memberikan peran yang cukup besar terhadap pemerintah. Terutama dalam hal pengelolaan dan penataan keuangan di daerah.

"Sejak memimpin BPK di Kalbar tahun 2013, dari hanya lima Pemkab dan Pemkot yang meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), hingga tahun 2015 lalu telah delapan kabupaten/kota meraih WTP," ujarnya.

Hal tersebut tentu tidak lepas dari peran Kepala BPK dengan arahan serta rekomendasi yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk komitmen mengatur



Kami telah menyiapkan program pada tahun 2017 mendatang sesuai dengan arahan dari BPK RI.

Ida Sundari
Kepala BPK RI Perwakilan Kalbar

keuangan daerah dengan sebaik-baiknya.

"Kami mengharapkan dengan kepemimpinan BPK yang baru di Kalbar, Kalbar dapat mengejar target sebagai provinsi seluruh kabupaten/kotanya meraih penilaian WTP," ujar Cristiandi

Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Kalbar Ida Sundari mengatakan akan melanjutkan seluruh tugas dan program yang telah disusun oleh kepala perwakilan sebelumnya.

"Kami telah menyiapkan program pada tahun 2017 mendatang sesuai dengan arahan dari BPK RI," ujar-

nya
Kendati demikian, pada pelaksanaannya nanti akan disesuaikan dengan situasional di Kalbar serta akan dilakukan revisi terhadap program yang mungkin telah disusun oleh pimpinan yang lama.

Untuk 2017, kata Ida, pihaknya telah menyusun sistem informasi pemantauan tindak lanjut. BPK telah melakukan pelatihan baik di internal maupun eksternal.

"Kami sudah mengundang Inspektorat pada 6 Desember lalu, sehingga dapat mengetahui progres-progres pemantauan tindak lanjut yang telah dilakukan oleh para entitas," ujarnya

Dia berharap di dalam pelaksanaannya pemeriksaan laporan keuangan bisa lebih awal dan penyelesaian rekomendasi dapat dilakukan lebih cepat.

Harapan di BPK sudah tentu dari 15 entitas di Kalbar yang meliputi 14 Kabupaten/Kota dan Provinsi dapat meraih WTP. Selanjut hal yang ditunggu adalah komitmen dari Kepala Daerah untuk menyelesaikan pengelolaan keuangan yang terbaik.

Anggota DPR RI dapil Kalbar Michael Jeno mengatakan ada hal lain yang tentu harus dilakukan oleh BPK selain melakukan audit keuangan juga dapat melakukan audit kinerja.

"Melalui audit kinerja nanti tentu dapat menghindari terjadinya kelalaian terhadap pengelolaan keuangan," ujarnya

Satu diantaranya dapat dilakukan oleh BPK, yakni audit Kinerja pada program pemerintah, yakni program kedaulatan pangan. BPK bisa melakukan seperti kinerja dari program tersebut, seperti melihat apakah nilai harga pangan tersebut turun atau tidak, daya jual dan kemakmuran petani meningkat atau tidak, hal seperti ini lah yang dinamakan audit kinerja. **(dan)**